

Partisipasi Politik Generasi Muda di Era Digital: Antara Kesadaran Kritis dan Aktivisme Daring

Andi Yusuf Katili¹, Andi Abee Zoelthan Katili², Agus Pariono³

¹³Universitas Bina Taruna Gorontalo

²MTs Negeri 1 Gorontalo

yusuf2801@gmail.com¹, abee291210@gmail.com², guspri811@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana generasi muda berpartisipasi dalam aktivitas politik melalui media digital, serta sejauh mana aktivitas tersebut mencerminkan kesadaran politik kritis dan aktivisme daring yang bermakna. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan analisis literatur dan data sekunder dari berbagai studi empiris terkait partisipasi politik digital dalam kurun waktu 2015–2025. Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental bentuk dan pola partisipasi politik generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang baru bagi ekspresi dan mobilisasi politik generasi muda, dengan platform seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter) memainkan peran signifikan dalam penyebaran informasi politik dan kampanye sosial. Namun, sebagian besar partisipasi tersebut masih bersifat simbolik dan tidak diiringi dengan pemahaman substansial terhadap isu-isu politik. Fenomena *slacktivism* dan rendahnya literasi politik menjadi hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi politik yang berkualitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi digital di Indonesia memerlukan penguatan literasi politik dan kesadaran kritis agar generasi muda tidak sekadar menjadi pengguna media sosial, tetapi juga aktor perubahan sosial yang reflektif dan konstruktif.

Kata Kunci: **Partisipasi Politik, Generasi Muda; Digital; Kesadaran Kritis; Aktivisme**

ABSTRACT

This study aims to analyze how young people engage in political activities through digital media and to what extent such activities reflect critical political consciousness and meaningful online activism. The research employs a descriptive-qualitative approach using literature analysis and secondary data from empirical studies on digital political participation conducted between 2015 and 2025. The development of digital technology has fundamentally transformed the forms and patterns of youth political participation. The findings indicate that social media has become a new arena for youth political expression and mobilization, with platforms such as Instagram, TikTok, and X (Twitter) playing a significant role in the dissemination of political information and social campaigns. However, most of these activities remain symbolic and are not accompanied by a

substantive understanding of political issues. The phenomenon of slacktivism and the lack of political literacy remain major obstacles to achieving meaningful political engagement. This study concludes that digital democracy in Indonesia requires the strengthening of political literacy and critical awareness so that young people can move beyond being mere social media users to becoming reflective and constructive agents of social change.

Keywords: *Political Participation, Youth; Digital; Critical Consciousness, Activism*

PENDAHULUAN

Perubahan teknologi komunikasi dalam dua dekade terakhir telah menggeser arena partisipasi politik: dari ruang-ruang fisik (rapat umum, pertemuan kampus, dan parlemen lokal) menuju ruang-ruang digital di mana opini, mobilisasi, dan pembentukan identitas politik terjadi secara cepat dan terjaring (networked). Fenomena ini sangat kentara di kalangan generasi muda — mereka yang tumbuh bersama internet dan platform media sosial — sehingga wacana tentang *digital civic engagement* dan *digital activism* menjadi krusial untuk dipahami dalam studi ilmu politik kontemporer (saud et al.; Lutz; Lee).

Di Indonesia, gelombang partisipasi politik generasi muda melalui media digital terlihat pada beberapa momen penting politik dan sosial: aksi-aksi protes yang terkoordinasi melalui tagar (#), kampanye kesadaran anti-korupsi, serta gerakan menolak kebijakan tertentu yang menyebar cepat lewat platform seperti Twitter/X, Instagram, dan TikTok. Studi-studi empiris menyatakan bahwa media digital tidak hanya memfasilitasi penyebaran informasi, tetapi juga membantu pembentukan identitas politik kolektif dan kapasitas mobilisasi pada kelompok muda (studi kasus Indonesia, 2019–2024). Namun ada ambiguitas: sementara beberapa penelitian menemukan efek memobilisasi, lain-lain menunjukkan bahwa bentuk partisipasi daring seringkali berupa ekspresi simbolik (slacktivism) yang belum tentu berujung pada keterlibatan politik offline yang substantif.

Konsep partisipasi politik sendiri telah berkembang dari definisi tradisional (suara di TPS, bergabung partai, kampanye door-to-door) menjadi spektrum aktivitas yang lebih luas: menghadiri diskusi online, menandatangani petisi digital, menyebarkan konten politik, mengorganisir aksi daring, hingga produksi konten opini politik. Kerangka teori partisipasi (mis. Verba & Nie; teoretisasi partisipasi online oleh Valeriani & Vaccari) menekankan bahwa partisipasi daring dapat memperbesar akses informasi dan menurunkan biaya partisipasi, tetapi efek akhir pada kualitas demokrasi tergantung pada literasi digital, modal sosial, dan lingkungan institusional yang memungkinkan aksi tersebut bertransmisi ke ranah kebijakan. Studi komparatif menunjukkan bahwa peran media sosial dalam

meningkatkan partisipasi cenderung dimediasi oleh faktor-faktor seperti efficacy politik, minat politik, dan modal sosial yang dimiliki individu.

Khusus untuk generasi muda Indonesia terdapat dinamika khas: tingkat penetrasi internet yang besar, pola konsumsi media yang condong ke platform visual dan algoritmik (mis. TikTok, Instagram), serta kepedulian terhadap isu-isu seperti korupsi, lingkungan, dan keadilan sosial. Penelitian empiris di Indonesia menemukan bahwa pemuda menggunakan media sosial bukan sekadar sebagai sumber informasi pasif, tetapi sebagai arena pembelajaran politik, pembentukan opini kolektif, dan terkadang sebagai alat pengawasan terhadap elite politik. Namun sekaligus muncul problem serius: disinformasi, polarisasi, dan keterbatasan literasi digital dapat menurunkan kualitas debat publik dan menyebabkan reaksi politik yang reaktif ketimbang reflektif. Oleh karena itu, kajian yang menimbang antara potensi mobilisasi dan risiko desinformasi menjadi penting.

Fenomena keterlibatan politik generasi muda dalam ranah digital menunjukkan bahwa ruang partisipasi tidak lagi terbatas pada arena konvensional seperti partai politik, organisasi kemahasiswaan, atau pemilihan umum. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan terjadinya **digital activism** atau aktivisme daring, di mana individu muda mengekspresikan pandangan politiknya melalui media sosial, petisi daring, dan kampanye digital (Loader et al., 2014). Transformasi ini mengindikasikan adanya pergeseran paradigma partisipasi politik dari bentuk formal menuju partisipasi non-konvensional yang lebih cair, spontan, dan terdesentralisasi (Gibson & Cantijoch, 2019).

Kehadiran media sosial seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube menjadi wadah baru bagi generasi muda dalam menyuarakan aspirasi, mengkritisi kebijakan, bahkan membangun solidaritas politik lintas batas geografis (Boulianne, 2020). Menurut penelitian Pew Research Center (2022), lebih dari 70% anak muda di bawah usia 30 tahun menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi politik. Hal ini menandai bahwa ruang digital kini menjadi arena deliberasi publik yang signifikan, di mana opini politik terbentuk, disebarkan, dan dinegosiasikan dalam jaringan sosial yang luas (Jenkins et al., 2016).

Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah aktivitas politik digital tersebut mencerminkan kesadaran kritis politik yang matang, atau sekadar aktivisme simbolik yang dangkal dan temporer? Isu ini penting karena partisipasi politik yang ideal bukan hanya tentang keterlibatan dalam wacana publik, tetapi juga tentang sejauh mana individu memahami struktur kekuasaan, nilai demokrasi,

serta tanggung jawab kewarganegaraan (Freire, 2018; Ekström, 2020). Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut semakin kompleks karena partisipasi digital sering kali dipengaruhi oleh disinformasi, polarisasi, dan rendahnya literasi politik (Suharto & Rahmawati, 2022).

Secara empiris, partisipasi politik generasi muda di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2024) mengungkapkan bahwa pemilih muda (17–30 tahun) mencapai lebih dari 55% dari total pemilih nasional. Meski demikian, tingkat keterlibatan mereka dalam proses politik formal seperti keanggotaan partai atau kegiatan advokasi politik masih tergolong rendah. Banyak dari mereka lebih aktif dalam kampanye berbasis media sosial seperti tagar #ReformasiDikorupsi, #SaveKPK, atau #TolakOmnibusLaw yang menggambarkan bentuk partisipasi non-konvensional dengan kekuatan mobilisasi massa digital (Lim, 2020).

Dari sisi teoritik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori partisipasi politik klasik (Verba, Nie, & Kim, 1978) yang menekankan pentingnya faktor kesadaran, kesempatan, dan kemampuan (awareness, opportunity, capability) sebagai determinan utama keterlibatan warga negara. Dalam konteks era digital, faktor-faktor ini mengalami redefinisi, karena kemampuan teknologi, akses internet, dan keterampilan literasi digital kini menjadi modal baru bagi keterlibatan politik (Theocharis, 2015). Generasi muda, yang secara umum lebih melek teknologi, memiliki potensi besar menjadi motor perubahan sosial-politik, asalkan diiringi oleh peningkatan kapasitas berpikir kritis dan pemahaman politik yang substansial (Bennett et al., 2020).

Selain itu, dinamika partisipasi politik generasi muda di dunia digital juga dipengaruhi oleh budaya politik digital (digital political culture). Budaya ini membentuk cara berpikir, berinteraksi, dan merespons isu politik melalui medium daring. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga arena simbolik di mana identitas politik terbentuk dan dipertarungkan (Papacharissi, 2019). Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa aktivisme digital tidak selalu identik dengan partisipasi politik substantif, karena banyak di antaranya bersifat clicktivism atau slacktivism — yaitu keterlibatan minimalis yang tidak menghasilkan perubahan nyata (Morozov, 2011; Skoric et al., 2021).

Persoalan utama yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sejauh mana partisipasi politik generasi muda di era digital mencerminkan kesadaran kritis yang berkontribusi pada demokrasi substantif, atau justru berubah menjadi aktivisme daring yang terbatas pada ekspresi tanpa dampak kebijakan. Untuk menjawabnya,

artikel ini menggabungkan tinjauan teori partisipasi politik dan demokrasi digital, menelaah bukti empiris dari studi Indonesia dan penelitian komparatif, serta mempertimbangkan variabel mediasi utama—termasuk literasi digital, efficacy politik, dan modal sosial—yang memengaruhi transfer partisipasi daring ke aksi politik nyata.

Secara metodologis, artikel ini akan memanfaatkan kerangka analisis kombinasi: menelaah studi kuantitatif dan kualitatif terbaru mengenai partisipasi politik digital di Indonesia, serta membandingkannya dengan hasil meta-analisis global tentang hubungan antara penggunaan media sosial dan keterlibatan sipil. Kerangka ini penting karena fenomena yang diamati bersifat multi-dimensi: aspek motivasi individu (micro), jaringan sosial dan platform (meso), serta sistem politik dan regulasi media (macro) saling berinteraksi membentuk pola partisipasi (Valeriani & Vaccari; Boulianne; meta-analisis UGM).

Dalam konteks implikasi kebijakan, pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas partisipasi muda di ruang digital akan membantu merancang intervensi pendidikan politik berbasis literasi digital, aturan platform untuk menekan penyebaran disinformasi, dan inisiatif-inisiatif yang menghubungkan aksi daring dengan mekanisme pengambilan keputusan formal (mis. konsultasi publik daring yang diimplementasikan secara partisipatif). Studi-studi menunjukkan bahwa intervensi yang berhasil cenderung multi-segi: menggabungkan pendidikan literasi media di sekolah/ kampus, regulasi yang adil terhadap platform, dan ruang formal bagi suara muda dalam pengambilan keputusan publik.

Akhirnya, artikel ini berkontribusi pada literatur ilmu politik pengantar dengan memetakan bagaimana transformasi digital memengaruhi agen-agen politik paling dinamis—yaitu generasi muda—dan apa konsekuensinya bagi kualitas demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan menempatkan analisis empiris Indonesia dalam konteks kajian internasional, artikel ini juga bertujuan memberi rekomendasi praktis bagi pendidikan politik, pembuat kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil yang ingin memaksimalkan potensi positif partisipasi digital sementara meminimalkan risikonya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Secara konseptual, partisipasi politik diartikan sebagai keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi kebijakan publik (Verba, Nie, & Kim, 1978). Dalam

konteks modern, partisipasi politik tidak hanya mencakup tindakan konvensional seperti memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga bentuk non-konvensional seperti demonstrasi, petisi, kampanye sosial, hingga partisipasi digital (Dalton, 2017).

Menurut Norris (2019), partisipasi politik merupakan refleksi dari kesadaran politik dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Partisipasi yang berkualitas menunjukkan adanya pemahaman mendalam terhadap isu publik, kemampuan berpikir kritis, serta kemauan untuk terlibat dalam proses politik secara konstruktif. Oleh karena itu, partisipasi bukan sekadar tindakan, melainkan ekspresi dari kapasitas kewarganegaraan (*civic competence*) yang berkembang seiring dengan tingkat pendidikan, literasi politik, dan akses terhadap informasi (Ekman & Amnå, 2012).

Dalam kajian ilmu politik klasik, Verba, Nie, dan Kim (1978) membedakan empat bentuk partisipasi politik: (1) voting atau pemungutan suara, (2) campaign activity, (3) communal activity, dan (4) particularized contact. Namun, perkembangan teknologi informasi menggeser batasan tersebut dengan melahirkan bentuk baru seperti online petition, digital campaigning, dan social media activism (Theocharis, 2015).

Teori Partisipasi Politik Generasi Muda

Generasi muda memiliki karakteristik partisipasi politik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih mengutamakan ekspresi identitas, nilai kebebasan, serta penggunaan teknologi sebagai medium komunikasi dan mobilisasi politik (Bennett et al., 2020). Menurut teori *civic voluntarism model* (Verba et al., 1995), partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni:

1. **Resources** (sumber daya), seperti waktu, uang, dan keterampilan;
2. **Psychological engagement**, yaitu minat dan motivasi terhadap politik;
3. **Recruitment networks**, yaitu akses terhadap jaringan yang mendorong partisipasi.

Dalam konteks digital, faktor-faktor ini mengalami perubahan substansial. Sumber daya politik kini mencakup literasi digital dan kapasitas teknologi; motivasi politik didorong oleh *issue-based activism* yang sering kali bersifat spontan dan emosional; sedangkan jaringan rekrutmen kini beroperasi melalui platform media sosial yang berperan sebagai “ruang publik virtual” (Papacharissi, 2019).

Theocharis (2015) mengembangkan konsep *digitally networked participation*, yaitu bentuk keterlibatan politik yang terdesentralisasi, berbasis

jaringan, dan dimediasi oleh teknologi digital. Dalam model ini, partisipasi tidak selalu terhubung dengan institusi formal, melainkan dengan isu dan identitas kolektif yang dibentuk secara organik melalui interaksi daring. Oleh karena itu, generasi muda menjadi aktor sentral dalam model partisipasi baru ini karena mereka memiliki kemampuan adaptif terhadap teknologi serta fleksibilitas dalam mengelola informasi politik (Loader et al., 2014).

Aktivisme Daring dan Demokrasi Digital

Aktivisme daring (*digital activism*) merupakan bentuk partisipasi politik yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyuarakan aspirasi, mengkritik kebijakan, dan memobilisasi dukungan publik (Joyce, 2019). Aktivisme ini mencakup berbagai kegiatan seperti kampanye di media sosial, penggunaan tagar politik, hingga aksi solidaritas global secara daring. Dalam konteks demokrasi digital, aktivisme daring dianggap sebagai inovasi partisipatif yang memperluas ruang keterlibatan publik di luar institusi formal (Boulianne, 2020).

Namun demikian, sejumlah kajian juga menunjukkan sisi problematis dari fenomena ini. Morozov (2011) memperkenalkan istilah *slacktivism* untuk menggambarkan partisipasi digital yang bersifat dangkal, simbolik, dan minim dampak nyata terhadap kebijakan. Skoric et al. (2021) mengonfirmasi bahwa meski media sosial meningkatkan frekuensi ekspresi politik, tidak semua bentuk ekspresi tersebut berujung pada tindakan politik substantif.

Dalam konteks Indonesia, aktivisme daring menunjukkan dua wajah: di satu sisi memperkuat demokrasi deliberatif melalui gerakan seperti #ReformasiDikorupsi, namun di sisi lain juga berpotensi memperburuk polarisasi politik akibat misinformasi dan *echo chamber* (Suharto & Rahmawati, 2022). Oleh karena itu, efektivitas aktivisme daring sebagai bentuk partisipasi politik perlu dikaji dengan mempertimbangkan aspek kesadaran kritis, etika digital, dan kapasitas literasi politik generasi muda.

Kesadaran Kritis dan Literasi Politik Digital

Konsep kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang diperkenalkan oleh Paulo Freire (2018) menjadi kunci dalam memahami partisipasi politik yang substantif. Freire menekankan pentingnya kemampuan reflektif individu untuk memahami struktur ketidakadilan sosial dan bertindak secara sadar untuk mengubahnya. Dalam konteks politik digital, kesadaran kritis berperan sebagai filter terhadap arus informasi yang masif dan sering kali menyesatkan.

Ekström (2020) menambahkan bahwa kesadaran politik generasi muda berkembang melalui interaksi sosial di ruang daring. Proses diskusi, debat, dan

pertukaran ide di media sosial dapat membentuk *political efficacy* — perasaan bahwa tindakan individu dapat memengaruhi hasil politik. Namun, tanpa kemampuan berpikir kritis dan verifikasi informasi, ruang digital justru dapat menjadi arena reproduksi bias dan disinformasi (Wardle & Derakhshan, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi politik generasi muda di era digital berdasarkan konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Menurut Creswell & Poth (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna yang dikonstruksi oleh individu terhadap suatu fenomena sosial, bukan untuk menguji hipotesis sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.

Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji pengalaman subjektif generasi muda dalam memahami, menilai, dan mengekspresikan partisipasi politiknya melalui media digital. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika naratif, simbol, serta bentuk interaksi yang muncul di ruang daring (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018).

Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo, yang merepresentasikan karakteristik masyarakat urban dengan tingkat penetrasi media sosial yang tinggi di kalangan remaja dan mahasiswa. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Gorontalo memiliki populasi muda yang cukup besar dan aktif menggunakan platform digital untuk komunikasi publik dan isu-isu sosial. Waktu penelitian dilaksanakan selama enam bulan, yakni dari Maret hingga Agustus 2025, mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis:

1. **Data primer**, diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi daring terhadap aktivitas politik generasi muda di media sosial (misalnya kampanye digital, unggahan politik, diskusi publik, dan partisipasi dalam isu sosial).
2. **Data sekunder**, diperoleh melalui analisis literatur akademik, laporan penelitian, artikel ilmiah, publikasi lembaga pemerintah, serta data statistik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pew Research Center, dan laporan survei digital nasional.

Pendekatan kombinasi data primer dan sekunder diharapkan memberikan pemahaman komprehensif terhadap konteks partisipasi politik digital (Flick, 2018).

Pemilihan informan dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2015). Kriteria informan meliputi:

- Berusia antara 17–30 tahun, termasuk mahasiswa, aktivis muda, atau pengguna aktif media sosial;
- Pernah terlibat dalam kegiatan atau kampanye politik digital;
- Memiliki pemahaman dan opini terhadap isu-isu politik kontemporer di Indonesia.

Jumlah informan direncanakan sebanyak 10–15 orang, dengan variasi latar belakang sosial dan tingkat keterlibatan politik yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap persepsi, motivasi, serta pola partisipasi politik di ruang digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Pola Partisipasi Politik Generasi Muda di Era Digital

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi kanal utama partisipasi politik generasi muda. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nugroho dan Syarif (2021), sebanyak 78% responden usia 17–25 tahun di Indonesia menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi politik, terutama melalui platform Instagram, TikTok, dan X (Twitter). Pola partisipasi ini tidak lagi berbasis pada kegiatan politik formal seperti mengikuti kampanye atau diskusi partai politik, tetapi beralih pada kegiatan digital seperti menyebarkan konten politik, berkomentar, atau berpartisipasi dalam petisi daring.

Temuan ini memperkuat pandangan Gil de Zúñiga et al. (2014) bahwa media sosial berfungsi sebagai *catalyst* bagi bentuk baru partisipasi politik yang lebih informal dan berbasis jaringan (*networked participation*). Di Indonesia, tren ini terlihat jelas dalam keterlibatan anak muda dalam isu-isu sosial-politik seperti #ReformasiDikorupsi (2019), #TolakOmnibusLaw (2020), hingga #SaveRempang (2023). Gerakan tersebut menunjukkan bahwa generasi muda menggunakan media digital sebagai sarana mobilisasi dan advokasi isu publik.

Namun, hasil analisis konten menunjukkan bahwa tidak semua bentuk partisipasi digital mengarah pada kesadaran politik yang mendalam. Sebagian besar partisipasi generasi muda masih bersifat ekspresif dan reaktif terhadap isu-isu viral. Menurut penelitian oleh Santoso dan Wibowo (2022), 60% responden mahasiswa mengakui bahwa mereka ikut mengunggah konten politik tanpa benar-benar memahami substansi kebijakan yang diperbincangkan. Fenomena ini

menggambarkan adanya *information gap* antara paparan informasi dan kesadaran kritis politik.

Kesadaran Kritis dan Aktivisme Daring

Konsep *critical political consciousness* (kesadaran politik kritis) mengacu pada kemampuan individu untuk menganalisis, menilai, dan bertindak terhadap ketidakadilan sosial dan politik (Freire, 1970; Watts et al., 2011). Dalam konteks digital, kesadaran ini diwujudkan dalam bentuk *digital activism* yang berorientasi pada perubahan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Dewi (2020) menemukan bahwa sebagian mahasiswa di Indonesia menggunakan media sosial untuk membangun wacana alternatif terhadap isu-isu sosial-politik, misalnya melalui podcast, video edukatif, dan kampanye daring. Ini menunjukkan bahwa sebagian kecil generasi muda sudah mulai memanfaatkan ruang digital secara produktif untuk memperluas diskursus politik dan mendorong perubahan sosial.

Namun, tingkat kesadaran kritis ini belum merata. Studi oleh Anindita dan Surya (2023) menunjukkan bahwa mayoritas anak muda masih menjadikan media sosial sebagai sarana ekspresi identitas diri daripada advokasi isu politik. Fenomena *slacktivism* (Morozov, 2012) masih kuat, di mana keterlibatan terbatas pada aktivitas simbolik seperti *like*, *share*, atau *retweet* tanpa tindakan nyata di luar dunia digital. Akibatnya, potensi media digital untuk memperkuat demokrasi sering kali terhambat oleh budaya konsumtif dan pencitraan.

Peran Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi Baru

Media sosial dapat berfungsi sebagai ruang publik digital (*digital public sphere*) sebagaimana dikonsepkan oleh Habermas (1989), namun dalam bentuk yang lebih cair dan terdesentralisasi. Penelitian oleh Haryanto dan Amelia (2021) menunjukkan bahwa ruang digital memungkinkan warga muda untuk membentuk opini politik secara bebas tanpa harus melalui institusi formal seperti partai politik atau media arus utama. Ini memperkuat demokrasi partisipatif yang berbasis pada kebebasan berekspresi dan akses informasi.

Namun demikian, ruang digital juga memiliki sisi gelap: penyebaran disinformasi, polarisasi politik, dan ujaran kebencian. Menurut data dari Kementerian Kominfo (2023), terdapat lebih dari 11.000 konten hoaks politik yang beredar menjelang Pemilu 2024. Kondisi ini mengancam kualitas partisipasi politik generasi muda yang belum memiliki literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, partisipasi digital harus diimbangi dengan pendidikan literasi politik yang kuat agar tidak mudah terjebak dalam manipulasi informasi.

Tantangan dan Implikasi terhadap Kualitas Demokrasi

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik generasi muda di era digital bersifat ambivalen: di satu sisi menunjukkan potensi besar bagi revitalisasi demokrasi, namun di sisi lain berisiko dangkal tanpa fondasi kesadaran kritis. Generasi muda cenderung mengandalkan opini viral dan *influencer politics* dalam membentuk preferensi politik. Seperti dikemukakan oleh Loader et al. (2016), politik digital kini sering beroperasi dalam logika popularitas dan algoritma, bukan deliberasi rasional sebagaimana diidealkan dalam demokrasi deliberatif.

Implikasinya, demokrasi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mentransformasikan *e-participation* menjadi *e-deliberation*. Dengan kata lain, generasi muda perlu diarahkan agar tidak hanya aktif secara kuantitatif di media sosial, tetapi juga mampu berkontribusi secara kualitatif dalam membangun wacana publik yang sehat dan kritis.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa generasi muda memainkan peran sentral dalam pembentukan pola baru partisipasi politik di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah mentransformasi cara generasi muda memperoleh informasi, berpendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik tidak lagi terpusat pada ruang institusional dan formal, tetapi berkembang melalui jaringan digital yang bersifat dinamis dan partisipatif.

Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan adanya paradoks dalam partisipasi politik digital generasi muda. Di satu sisi, mereka menunjukkan semangat dan kepedulian terhadap isu-isu sosial dan politik melalui berbagai bentuk ekspresi digital, seperti kampanye daring, *online petition*, dan gerakan sosial berbasis tagar. Di sisi lain, banyak aktivitas tersebut masih bersifat dangkal dan tidak berorientasi pada perubahan nyata. Fenomena *slacktivism* dan *clicktivism* menjadi indikasi bahwa sebagian besar partisipasi politik digital masih terbatas pada aktivitas simbolik yang tidak selalu disertai dengan kesadaran kritis terhadap isu-isu substantif.

Kesadaran politik kritis yang seharusnya menjadi fondasi utama partisipasi demokratis belum sepenuhnya terbentuk di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya literasi politik dan digital, pengaruh algoritma media sosial yang mempersempit ruang deliberasi, serta dominasi opini populer dibandingkan argumentasi rasional. Dengan demikian, demokrasi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan untuk

mentransformasikan partisipasi kuantitatif menjadi partisipasi yang berkualitas dan reflektif.

Meskipun begitu, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat sebagian kelompok muda yang mampu memanfaatkan media digital secara produktif dan kritis, misalnya melalui pembuatan konten edukatif, diskusi politik daring, serta kolaborasi antar-komunitas untuk mengadvokasi isu sosial. Kelompok ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai instrumen pembelajaran demokrasi dan pemberdayaan politik, asalkan didukung oleh kesadaran kritis, kemampuan berpikir reflektif, serta literasi digital yang kuat.

Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Literasi Politik dan Digital bagi Generasi Muda

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu mengembangkan program literasi politik digital yang berorientasi pada penguatan kesadaran kritis. Program ini dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan kewarganegaraan, pelatihan media literacy, dan kampanye publik yang mengajarkan cara mengenali disinformasi serta berpikir analitis terhadap isu-isu politik.

2. Penguatan Peran Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi perlu berperan lebih aktif dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi politik substantif kepada mahasiswa. Mata kuliah seperti *Pengantar Ilmu Politik* dan *Komunikasi Politik* dapat menjadi ruang strategis untuk membentuk pola pikir kritis dan reflektif terhadap dinamika politik digital.

3. Keterlibatan Lembaga Pemerintah dan Komunitas Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama dengan komunitas digital, dapat menginisiasi platform edukatif yang memfasilitasi dialog publik antara generasi muda dan pembuat kebijakan. Hal ini penting agar ruang digital tidak hanya menjadi arena ekspresi, tetapi juga wahana deliberasi kebijakan publik yang konstruktif.

4. Pendekatan Multisektor dalam Membangun Demokrasi Digital

Upaya memperkuat partisipasi politik generasi muda perlu melibatkan berbagai sektor — pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan demokratis.

5. Penelitian Lanjutan

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* agar dapat mengukur secara empiris tingkat kesadaran kritis dan dampak nyata partisipasi digital terhadap perilaku politik generasi muda. Selain itu, studi komparatif antarwilayah atau antarnegara juga dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana konteks sosial dan budaya memengaruhi partisipasi politik digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, R., & Surya, D. (2023). *Youth and Political Expression on Social Media: Between Digital Identity and Civic Engagement in Indonesia*. Journal of Digital Communication and Society, 8(2), 44–61. <https://doi.org/10.1177/20563051231100472>
- Dahlberg, L. (2018). *Rethinking the Digital Public Sphere: The Problem of Participation*. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 24(3), 228–243. <https://doi.org/10.1177/1354856516675268>
- Gil de Zúñiga, H., Diehl, T., & Ardévol-Abreu, A. (2017). *Expression Effects, Political Efficacy, and Collective Action Online: Testing the Spiral of Participation Model in the Digital Context*. Journal of Communication, 67(5), 772–792. <https://doi.org/10.1111/jcom.12347>
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Haryanto, A., & Amelia, N. (2021). *Ruang Publik Digital dan Demokrasi di Indonesia: Analisis Partisipasi Politik Generasi Milenial di Media Sosial*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 11(1), 21–37. <https://doi.org/10.22146/jipk.2021.343>
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2016). *Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics*. Polity Press.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan: Penanganan Konten Hoaks dan Disinformasi Politik di Media Sosial 2023*. Kominfo Press.
- Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. (2016). *Performing for the Young Networked Citizen? Celebrity Politics, Social Media, and the Political Engagement of Youth*. Media, Culture & Society, 38(3), 400–419. <https://doi.org/10.1177/0163443715608261>

- Morozov, E. (2012). *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. PublicAffairs.
- Nugroho, A., & Syarif, M. (2021). *Digital Citizenship and Political Participation among Indonesian Youths*. *Journal of Southeast Asian Media Studies*, 3(2), 99–117. <https://doi.org/10.31124/seams.321>
- Prasetyo, F., & Dewi, S. (2020). *Digital Activism among Indonesian University Students: Political Awareness and Online Participation*. *Jurnal Politik*, 6(2), 233–249. <https://doi.org/10.7454/jp.v6i2.1123>
- Santoso, R., & Wibowo, T. (2022). *From Clicktivism to Real Activism: Assessing Political Participation of Millennials in Indonesia*. *Journal of Civic Media and Communication*, 9(1), 14–30. <https://doi.org/10.1080/17445647.2022.103142>
- Theocharis, Y., & van Deth, J. W. (2018). *Political Participation in a Changing World: Conceptual and Empirical Challenges in the Study of Citizen Engagement*. Routledge.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
- Watts, R. J., Diemer, M. A., & Voight, A. M. (2011). *Critical Consciousness: Current Status and Future Directions*. In C. A. Flanagan & B. D. Christens (Eds.), *Youth Civic Development: Work at the Cutting Edge* (pp. 43–57). Jossey-Bass.
- Lee, Y., et al. (2021). *Social media capital and civic engagement: Does type of social media use matter?* PLOS ONE.
- Saud, M. (2023). *Cultural dynamics of digital space: Democracy, civic and youth networked engagement (Indonesia & Pakistan)*. *Journal* (article).
- Wahyuningroem, S. L. (2024). *Youth political participation and digital movement in Indonesia*. *PMC* (Open Access article).
- Alodat, A. M. (2023). *Social Media Platforms and Political Participation: A Study*. *Social Sciences* (MDPI).
- Jati, W. R. (2023). *The State of Digital Literacy among Youths*. *Jurnal* (UI ScholarHub).
- UGM Review Team. (2024). *Social Media's Influence on Political Participation: Systematic review and meta-analysis*. *Jurnal PSI* (UGM).
- An empirical analysis of social media usage, political learning and participation among youth: comparative study of Indonesia and Pakistan. (2020). *Quality & Quantity / Springer*.

- Boulianne, S. (2015). *Social media and citizen engagement: A meta-analytic review*. *Political Communication*, 32(2), 2015.
- Valeriani, A., & Vaccari, C. (2016). *Online political engagement and mobilization: Review of literature*. *Journal*.
- Boell Foundation. (2022). *Transformation or stagnation? How digital media is changing student activism in Indonesia*. (Policy/blog piece).